

Received: 2023-10-22, Received in revised form: 2024-08-12, Accepted: 2024-12-31

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Dampaknya terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas

Zainun¹, Muhamad Arifin^{1*}

¹STIS Darul Falah Pagutan Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia

e-mail: *arifinmuhammad2022@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/itqan.v15i2.1271>

ABSTRACT

The *Merdeka Curriculum* (Independent Curriculum) emerges as a strategic response to the need for a more adaptive and learner-centered transformation of Indonesia's national education system. At the senior high school level, this policy requires institutional readiness, competent educators, and well-aligned supporting regulations. This study aims to analyze the implementation, benefits, challenges, and policy directions underlying the adoption of the Merdeka Curriculum in senior high schools. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected from academic literature, official reports issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, as well as findings from relevant previous studies. The analysis explored the interrelation between policy design, classroom implementation, and its impact on the quality of learning in senior high schools. The findings reveal that the implementation of the Merdeka Curriculum is being carried out gradually, depending on the readiness of human resources and school infrastructure. The curriculum offers teachers greater flexibility in designing contextual learning while promoting collaboration among schools, parents, and the community. Nonetheless, several challenges remain, including disparities in school readiness, limited pedagogical and digital competencies among teachers, and the need for continuous evaluation of policy effectiveness. The Merdeka Curriculum has shown positive impacts on post-pandemic learning recovery and the strengthening of students' *Pancasila* character values. Its success largely depends on coherent policies, improved teacher competencies, and systemic support from multiple stakeholders. The implication is that the implementation of the Merdeka Curriculum should be accompanied by the continuous capacity building of schools and teachers to ensure a sustainable learning movement that remains relevant to the dynamics of 21st-century education.

Keywords: *Merdeka Curriculum, Educational Implementation, Educational Policy, Independent Learning*

Copyright Holder: © Zainun, Muhamad Arifin (2024)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#)



ABSTRAK

Kurikulum Merdeka hadir sebagai respon strategis terhadap kebutuhan transformasi pendidikan nasional yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), kebijakan ini menuntut kesiapan satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan dukungan kebijakan yang sinergis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, manfaat, tantangan, serta arah kebijakan pendukung dalam penerapan Kurikulum Merdeka di SMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui telaah literatur akademik, laporan kebijakan Kemdikbudristek, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara kebijakan, praktik implementasi, dan dampak terhadap mutu pembelajaran di tingkat SMA. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMA berjalan bertahap, bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana sekolah. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi guru dalam merancang pembelajaran yang kontekstual, serta mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk kesenjangan kesiapan antar sekolah, keterbatasan kompetensi pedagogis dan digital guru, serta kebutuhan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan. Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap pemulihan pembelajaran pascapandemi dan penguatan karakter pelajar Pancasila. Keberhasilannya bergantung pada sinergi kebijakan, peningkatan kompetensi guru, dan dukungan sistemik lintas pemangku kepentingan. Implikasinya, penerapan Kurikulum Merdeka perlu disertai penguatan kapasitas sekolah dan guru agar menjadi gerakan pembelajaran yang berkelanjutan dan relevan dengan dinamika pendidikan abad ke-21.

Kata Kunci: *Kurikulum Merdeka, Implementasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Merdeka Belajar*

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa, karena melalui pendidikanlah manusia dapat mengembangkan potensi diri, beradaptasi terhadap perubahan, serta berkontribusi bagi kemajuan sosial dan ekonomi (Tilaar, 2012). Dalam konteks globalisasi dan revolusi teknologi, dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif (Hamalik, 2017). Oleh sebab itu, setiap sistem pendidikan harus terus berinovasi dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kurikulum merupakan instrumen strategis dalam mencapai tujuan pendidikan, sebab di dalamnya tercermin nilai, arah, dan strategi pembelajaran yang hendak dituju (Ihsan, 2016). Tyler (2013) menjelaskan bahwa kurikulum

sejatinya adalah rencana pembelajaran yang memuat tujuan, pengalaman belajar, pengorganisasian, dan evaluasi hasil belajar. Dalam pandangan Nasution (2015), kurikulum juga mencakup seluruh pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik di bawah bimbingan sekolah. Dengan demikian, perubahan kurikulum bukan hanya pergeseran administratif, melainkan transformasi paradigma pendidikan. Setiap perubahan menuntut penyesuaian kebijakan, kesiapan tenaga pendidik, serta dukungan sumber daya yang memadai (Beauchamp, 2018).

Kehadiran Kurikulum Merdeka merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan pembelajaran yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menjadi tonggak penting setelah pandemi COVID-19 yang menyoroiti keterbatasan sistem konvensional (Mulyasa, 2022). Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang mendalam dan bermakna melalui *Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*, serta memberi ruang bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan kegiatan belajar sesuai konteks lokal (Chaniago et al., 2022; Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, 2022). Arifin (2019) menegaskan bahwa efektivitas kurikulum ditentukan oleh kemampuannya mengakomodasi keragaman peserta didik, baik dari aspek kemampuan, minat, maupun gaya belajar.

Meskipun secara konseptual Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan dan otonomi bagi sekolah, implementasinya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menghadapi tantangan yang kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam memahami struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, serta asesmen formatif masih belum merata di seluruh daerah (Muhafid & Retnawati, 2023; Puspitasari et al., 2018). Penelitian (Ramadhan & Warneri, 2023) menemukan bahwa siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan proyek dan menunjukkan peningkatan motivasi belajar di SMA Swasta Kapuas Pontianak.

Namun, penelitian (Hutabarat et al., 2022) di Padangsidimpuan memperlihatkan bahwa guru masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap sistem asesmen dan perangkat ajar yang baru. Kondisi serupa ditemukan oleh Faiz et al. (2022) yang menyoroiti perbedaan tingkat pemahaman guru terhadap prinsip Kurikulum Merdeka serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Di sisi lain, sebagian sekolah di daerah masih terkendala pada ketersediaan sarana pembelajaran digital, pelatihan guru, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara nasional dengan implementasi di lapangan.

Kesenjangan inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini. Kajian-kajian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek penerapan Kurikulum Merdeka secara umum atau pada jenjang sekolah dasar (Utia et al., 2024; Aulia et al., 2023), sementara analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran masih terbatas. Padahal, jenjang SMA merupakan fase kritis dalam menyiapkan peserta didik menuju pendidikan tinggi dan dunia kerja. Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana kebijakan ini diterjemahkan dalam praktik oleh guru, serta bagaimana variasi konteks sekolah memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis kebijakan pendidikan dengan meninjau dimensi kebijakan, pelaksanaan, serta hasil implementasi di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang efektivitas kebijakan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA, sekaligus menjadi dasar bagi penyempurnaan kebijakan pendidikan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah dan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap berbagai sumber literatur yang membahas penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dalam konteks yang alami (Creswell, 2016), sedangkan studi kepustakaan memusatkan perhatian pada pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan (Zed, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen kebijakan resmi, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah yang secara langsung membahas konsep, kebijakan, serta praktik Kurikulum Merdeka. Adapun sumber data sekunder meliputi artikel populer, laporan penelitian, dan berita daring yang menyoroti dinamika penerapannya di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat isi sumber literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Arikunto (2016), metode dokumentasi

mencakup pengumpulan data dari berbagai bentuk tulisan seperti buku, laporan, notulen, dan arsip yang relevan dengan objek kajian.

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang menekankan pada proses interpretatif terhadap makna yang terkandung dalam teks (Krippendorff, 2018). Proses ini dilakukan melalui tiga tahap: (1) kondensasi data, dengan menyeleksi literatur yang paling relevan dan kredibel; (2) penyajian data, dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema utama seperti konsep, implementasi, dan dampak Kurikulum Merdeka; serta (3) penarikan kesimpulan, dengan mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan kontribusi hasil kajian terhadap pengembangan pendidikan nasional (Miles et al., 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas

Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional yang menekankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Program ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pemulihan pembelajaran pascapandemi serta tuntutan abad ke-21 yang menekankan kompetensi berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas (Kemendikbudristek, 2022). Karenanya, sekolah dituntut untuk tidak hanya menyesuaikan struktur kurikulum, tetapi juga mengubah paradigma pengajaran agar lebih adaptif dan kontekstual dengan karakteristik peserta didik serta kondisi daerah (Yusuf, 2023).

Secara operasional, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMA dibagi menjadi tiga jalur implementasi, yaitu *mandiri belajar*, *mandiri berubah*, dan *mandiri berbagi* (Mulyono & Sulistyani, 2022). Masing-masing jalur mencerminkan tingkat kesiapan sekolah dalam mengadopsi prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Sekolah yang berada pada tahap *mandiri belajar* umumnya masih menyesuaikan perangkat ajar dan asesmen, sedangkan sekolah yang berada pada tahap *mandiri berbagi* telah menjadi rujukan bagi satuan pendidikan lain dalam penerapan kurikulum ini. Penelitian Annabila et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, budaya kolaboratif antarguru, serta dukungan dari pemerintah daerah.

Tabel 1. Jalur Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas

Jalur Implementasi	Karakteristik Utama
Mandiri Belajar	Sekolah mulai mencoba menerapkan Kurikulum Merdeka secara terbatas tanpa perubahan besar, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa.
Mandiri Berubah	Sekolah mulai menggunakan perangkat ajar resmi dari Kemendikbudristek dan menyesuaikan pelaksanaan dengan konteks lokal.
Mandiri Berbagi	Sekolah mengembangkan sendiri perangkat ajar, membagikan praktik baik, dan menjadi rujukan bagi sekolah lain.

Di tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah berperan penting dalam membangun ekosistem pembelajaran yang selaras dengan visi Kurikulum Merdeka. Penelitian Mailani et al. (2023) menemukan bahwa kepala sekolah yang aktif melakukan supervisi akademik dan memberikan ruang bagi guru untuk bereksperimen dalam pembelajaran berdampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi siswa. Sementara itu, guru diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan individual peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan Pribadi et al. (2023) bahwa peran guru dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi sekadar penyampai materi, tetapi pembimbing proses belajar yang berorientasi pada penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran juga menjadi indikator penting keberhasilan implementasi. Kurikulum Merdeka mendorong model pembelajaran berbasis proyek yang menghubungkan konsep akademik dengan realitas kehidupan sehari-hari. Studi Pahlevi et al. (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek pada tema lingkungan di sekolah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran sosial siswa secara signifikan. Pendekatan ini menjadikan peserta didik lebih aktif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya, sekaligus menumbuhkan karakter kemandirian dan gotong royong yang menjadi inti dari profil pelajar Pancasila.

Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di SMA bukan hanya transformasi administratif, melainkan perubahan paradigma pendidikan yang menuntut kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan peserta didik dalam membangun pengalaman belajar yang bermakna. Keberhasilan penerapan kurikulum ini sangat bergantung pada konsistensi dukungan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan satuan pendidikan untuk

beradaptasi dengan perubahan. Bagian selanjutnya akan membahas bagaimana penerapan kurikulum ini memberikan manfaat nyata sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi ekosistem pendidikan di tingkat SMA.

Manfaat dan Tantangan Penerapan Kurikulum Merdeka di SMA

Penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA memberikan berbagai manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, sekaligus menghadirkan sejumlah tantangan dalam praktiknya. Secara umum, manfaat kurikulum ini tampak dari meningkatnya partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, meningkatnya kreativitas guru dalam merancang pembelajaran, serta tumbuhnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun, di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemahaman konseptual terhadap filosofi Merdeka Belajar masih menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas implementasi di lapangan (Alfurqan, & Khairara, 2023).

Bagi peserta didik, Kurikulum Merdeka membuka ruang yang luas untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat secara mandiri. Penelitian Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berdampak positif terhadap peningkatan motivasi belajar siswa SMA dengan korelasi yang sangat kuat sebesar 0,97. Kebebasan dalam memilih mata pelajaran dan keterlibatan dalam proyek-proyek kontekstual membuat siswa lebih antusias dan merasa pembelajaran lebih bermakna. Sejalan dengan itu, Sa'diyah dkk. (2023) menegaskan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan kreativitas dan rasa tanggung jawab terhadap proses belajarnya.

Dari perspektif guru, Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan dalam merancang proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru tidak lagi terikat pada format tunggal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melainkan dapat menyesuaikannya dengan konteks kelas. Lince (2022) menyoroti bahwa peran guru dalam Kurikulum Merdeka bergeser menjadi fasilitator, mediator, dan motivator yang mendorong siswa belajar secara aktif dan reflektif. Guru juga dituntut untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar, yang menurut penelitian Pawartani dan Suciptaningsih (2024), menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penerapan kurikulum ini.

Bagi orang tua dan masyarakat, Kurikulum Merdeka menciptakan peluang kolaborasi yang lebih besar dalam mendukung pendidikan anak. Melalui pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kokurikuler, orang tua dapat berperan sebagai mitra dalam mendampingi anak mengerjakan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian Alfurqan, & Khairara

(2023) menemukan bahwa keterlibatan orang tua secara aktif dalam implementasi Kurikulum Merdeka berkorelasi positif dengan peningkatan prestasi akademik dan nonakademik siswa. Dengan demikian, hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi lebih sinergis dan partisipatif.

Dari sisi institusi sekolah, penerapan Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan program unggulan sesuai visi, misi, dan potensi daerah. Sekolah dapat merancang pembelajaran yang mengangkat kearifan lokal, seperti program kemaritiman di daerah pesisir atau program agribisnis di kawasan pertanian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kontekstualisasi pendidikan sebagaimana ditegaskan oleh Salabi (2020), bahwa relevansi kurikulum dengan karakteristik lingkungan dapat memperkuat daya saing sekolah dan identitas lokal.

Meski demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari sejumlah tantangan struktural dan pedagogis. Alfurqan, & Khairara (2023) mengidentifikasi bahwa hambatan utama terletak pada keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran berdiferensiasi, kurangnya sarana pendukung digital, dan resistensi terhadap perubahan dari sebagian tenaga pendidik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal kesiapan sumber daya. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya strategi pendampingan berkelanjutan, pelatihan berbasis praktik, serta penguatan jejaring antar sekolah agar implementasi kurikulum dapat berjalan lebih merata.

Secara keseluruhan, manfaat Kurikulum Merdeka telah tampak melalui peningkatan kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi di lingkungan sekolah, tetapi keberlanjutan keberhasilannya sangat bergantung pada upaya sistematis dalam mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten, monitoring yang adaptif, serta peran aktif berbagai pihak untuk memastikan Kurikulum Merdeka benar-benar menjadi instrumen transformasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Kebijakan Pendukung dan Arah Penguatan Merdeka Belajar di SMA

Implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Kurikulum Merdeka, di antaranya Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka dan Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah

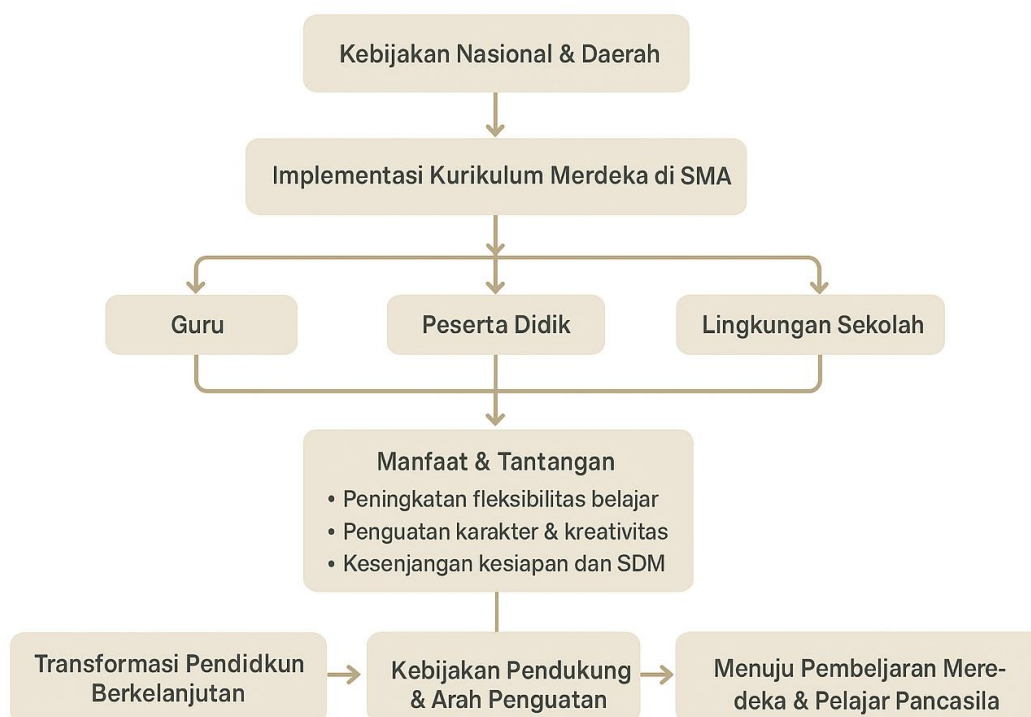
untuk memilih jalur implementasi, yaitu: Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi sesuai dengan tingkat kesiapan sumber daya dan ekosistem pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan.

Di tingkat daerah, dinas pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong kesiapan satuan pendidikan melalui program pendampingan, pelatihan guru, serta fasilitasi kolaborasi antar-sekolah. Penelitian Nasution et al. (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di sejumlah Sekolah dipengaruhi oleh kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kapasitas guru melalui Komunitas Belajar Merdeka (KMB) dan Platform Merdeka Mengajar. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan nasional dan lokal menjadi kunci untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar di lapangan.

Kebijakan Merdeka Belajar juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih partisipatif dan berbasis konteks. Prinsip *school-based management* (manajemen berbasis sekolah) kembali ditekankan, di mana kepala sekolah dan guru diberi ruang untuk berinovasi dalam merancang kurikulum operasional dan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Tilaar (2012), desentralisasi pendidikan yang efektif hanya dapat terwujud apabila sekolah diberi kepercayaan dan otonomi yang diimbangi dengan tanggung jawab mutu dan akuntabilitas.

Secara prospektif, arah penguatan Merdeka Belajar di tingkat SMA menuntut adanya penguatan kapasitas profesional guru, pengembangan sistem asesmen autentik, serta integrasi teknologi pembelajaran yang berkelanjutan. Rencana strategis Kemendikbudristek 2025–2029 bahkan menempatkan transformasi digital dan kompetensi abad ke-21 sebagai fokus utama kebijakan pendidikan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak sekadar menjadi inovasi kurikulum, melainkan bagian dari perubahan paradigma pendidikan menuju pembelajaran yang adaptif, reflektif, dan berorientasi pada pengembangan karakter pelajar Pancasila.

Dengan demikian, kebijakan pendukung Merdeka Belajar di tingkat SMA berfungsi sebagai fondasi penguatan ekosistem pembelajaran yang dinamis. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sekolah, masyarakat, dan dunia kerja menjadi syarat penting agar Kurikulum Merdeka tidak hanya diimplementasikan secara administratif, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam budaya belajar yang merdeka, kreatif, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Alur Konseptual Hubungan antara Implementasi, Manfaat dan Tantangan, serta Kebijakan Penguatan Kurikulum Merdeka di SMA

Gambar di atas menjelaskan hubungan konseptual antara tiga komponen utama hasil pembahasan, yaitu implementasi, manfaat–tantangan, dan kebijakan pendukung Kurikulum Merdeka di tingkat SMA. Alur tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di satuan pendidikan menjadi titik awal perubahan praksis pembelajaran, yang kemudian menghasilkan beragam manfaat sekaligus tantangan kontekstual bagi peserta didik, guru, dan lembaga pendidikan.

Dari hasil refleksi atas manfaat dan tantangan tersebut, muncul kebutuhan akan penguatan kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif, baik di tingkat sekolah maupun pemerintah daerah. Panah arah pada bagan memperlihatkan keterkaitan dinamis dan siklus penguatan berkelanjutan (*continuous improvement*), di mana kebijakan tidak berhenti pada tataran regulatif, tetapi berfungsi sebagai umpan balik terhadap praktik dan pengalaman empiris di lapangan.

Secara konseptual, alur ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, melainkan juga pada kemampuan sekolah untuk melakukan adaptasi dan refleksi terhadap hasil penerapan di tingkat praktis. Dengan demikian, hubungan antara ketiga komponen tersebut membentuk suatu ekosistem pembelajaran yang saling

mendukung dan memperkuat, menuju tercapainya tujuan pendidikan yang merdeka, kontekstual, dan berkarakter.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA bukan sekadar transformasi kurikulum, tetapi juga merupakan proses perubahan paradigma pendidikan menuju pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada karakter. Implementasi yang efektif menuntut sinergi antara kesiapan sekolah, dukungan kebijakan, serta keterlibatan aktif guru, peserta didik, dan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan dan keberhasilan Kurikulum Merdeka akan sangat ditentukan oleh kemampuan setiap pemangku kepentingan dalam menyeimbangkan antara kebebasan pedagogis dan tanggung jawab institusional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMA merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi pendidikan nasional menuju sistem yang lebih adaptif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Implementasi di lapangan menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan sekolah dan kemampuan guru dalam menerjemahkan prinsip kemerdekaan belajar ke dalam praktik pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan karakteristik siswa.

Manfaat yang muncul dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka mencakup peningkatan motivasi dan kreativitas belajar siswa, penguatan peran guru sebagai fasilitator, serta perluasan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, variasi kesiapan antar sekolah, dan kebutuhan penguatan kapasitas guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta asesmen autentik.

Kebijakan pendukung seperti Asesmen Nasional, penyusunan RPP yang fleksibel, dan optimalisasi Dana BOS memberikan fondasi struktural bagi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Keberhasilan jangka panjangnya menuntut sinergi lintas level pemerintahan dan konsistensi evaluasi berkelanjutan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan benar-benar berdampak pada kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

Dengan demikian, Kurikulum Merdeka bukan hanya inovasi teknis, melainkan refleksi filosofis tentang makna belajar yang memerdekakan, yang menuntut perubahan cara pandang seluruh pemangku kepentingan pendidikan dari sekadar mengajar menjadi mendampingi, dari menilai hasil menjadi

memfasilitasi proses, dan dari mengikuti kurikulum menjadi menghidupi nilai-nilai pembelajaran yang manusiawi, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfurqan, & Khairara. (2023). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.47766/itqan.v14i1.1457>.
- Annabila, S., Sunarni, S., & Juharyanto, J. (2023). Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak: Sumbangan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 6(4), 340-353. <https://journal-fip.um.ac.id/index.php/jamp/article/view/1631>.
- Arifin, Z. (2019). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Aulia, D., Hadiyanto, & Rusdinal. (2023). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Melalui Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 11(1), 122–133. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v11i1.25923>.
- Beauchamp, G. A. (2018). *Curriculum Theory: Meaning, Development, and Use*. Peacock Publishers.
- Chaniago, S., Yeni, D. F., & Setiawati, M. (2022). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran Geografi di MAN I Koto Baru. *Sultra Educational Journal*, 2(3), 184–191. <https://doi.org/10.54297/seduj.v2i3.400>.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2022). *Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan*. Kemendikbudristek.
- Faiz, A., Pratama, A., & Kurniawaty, I. (2022). Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Program Guru Penggerak pada Modul 2.1. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2846–2853. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2504>.
- Hamalik, O. (2017). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.
- Hutabarat, H., Harahap, M. S., & Elindra, R. (2022). Analisis penerapan kurikulum merdeka belajar di SMA Negeri Sekota Padangsidimpuan. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 58–69. <https://doi.org/10.37081/mathedu.v5i3.3962>.
- Ihsan, F. (2016). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta.

- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Lince, L. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 1, 38-49. <https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/SENTIKJAR/article/view/829>.
- Mailani, I., Nazir, M., & Zein, M. U. (2023). Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Profesionalitas Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 1061-1076. <https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/314>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Muhafid, E. A., & Retnawati, H. (2023). Persiapan Guru SD untuk Menerapkan Kurikulum Merdeka Tahun 2022: Sebuah Studi Fenomenologi. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(2), 637-652. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i2.2566.
- Mulyasa, E. (2022). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bumi Aksara.
- Mulyono, R., & Sulistyani, F. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Sebagai Sebuah Pilihan bagi Satuan Pendidikan: Kajian Pustaka. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 1999-2019. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v8i2.506>.
- Nasution, A. F., Ningsih, S., Silva, M. F., Suharti, L., & Harahap, J. P. (2023). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(3), 201-211. <https://doi.org/10.58355/competitive.v2i3.37>.
- Nasution, S. (2015). *Pengembangan Kurikulum*. Citra Aditya Bakti.
- Pahlevi, M. R., Habiburrahman, N., Muttaqin, M. Z., & Pekei, M. (2021). Efektivitas Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Tema Lingkungan Lokal untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Pembelajaran dan Riset Pendidikan*, 1(2), 609-616. <https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/jprp/article/view/1714>.
- Pawartani, T., & Suciptaningsih, O. A. (2024). Pengembangan Kompetensi Guru untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2182-2191. <https://doi.org/10.54371/jljp.v7i3.3478>.
- Pribadi, R. A., Syahid, S. A., & Putri, A. O. (2023). Peran Guru Sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 6(3), 729-736. <https://journal.matappa.ac.id/index.php/dikdas/article/view/2953>.
- Puspitasari, R., Rahmah, F. N., Nugroho, A. A., Khamidah, F. N., & Sutrimo, M. S. (2018). Analisis Kesiapan Sekolah terhadap Perubahan Kurikulum Studi Kasus SMK Perindustrian Yogyakarta dan SMA Negeri 5 Yogyakarta.

- Idaarah: *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2), 280–288.
<https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.6843>
- Ramadhan, I., & Warneri, W. (2023). Migrasi Kurikulum: Kurikulum 2013 Menuju Kurikulum Merdeka pada SMA Swasta Kapuas Pontianak. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 751–758.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4760>.
- Sa'diyah, I. S., Oktavia, R., Bisyyara, R. S., & Badrudin, B. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Jenjang SMA. *Khazanah Multidisiplin*, 4(2), 348–362. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/view/28436>.
- Salabi, A. S. (2020). Efektivitas dalam Implementasi Kurikulum Sekolah. *Education Achievement: Journal of Science and Research*.
<https://doi.org/10.28926/jprp.v1i2.1714>.
- Sari, Y. G., Putra, B. E., Miranti, Y., & Setiawati, M. (2022). Hubungan Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dengan Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kelas X DI SMA 1 IX Koto Sungai Lasi. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 131–138.
<https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol1.Iss4.375>.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Rineka Cipta.
- Tyler, R. W. (2013). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press.
- Utia, M., Mas, S. R., & Suling, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa. *Equity In Education Journal*, 6(2), 69–76. <https://doi.org/10.37304/eej.v6i2.15511>.
- Yusuf, M. (2023). *Inovasi pendidikan abad-21: Perspektif, Tantangan, dan Praktik Terkini*. Selat Media.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.